



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Pentingnya penataan regulasi izin usaha, ritel modern jangan melemahkan UMKM
Tanggal	: Sabtu, 01 November 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Pentingnya Penataan Regulasi Izin Usaha

Ritel Modern Jangan Melemahkan UMKM

KALANGAN Senayan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Masyarakat (Menko PM) Muhammin Iskandar soal dominasi ritel modern. Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menilai, pernyataan tersebut harus dipahami sebagai upaya membenahi ketimpangan ekonomi nasional, bukan sebagai serangan terhadap pelaku usaha tertentu.

Hal itu dapat dilihat sebagai dorongan agar Pemerintah menata kembali ekosistem perdagangan nasional.

"Ritel modern dan usaha kecil tidak seharusnya saling melemahkan, tetapi tumbuh bersama secara seimbang," ujar Rivqy dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Diketahui, Menko PM Muhammin Iskandar alis Cak Imin mengatakan, ekspansi ritel modern yang masuk hingga ke desa telah menjadi "pembunuhan ekonomi rakyat" dan mengancam kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Terus terang, raksasa gurita itu betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah,"

ujar Cak Imin dalam acara 1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa, yang digelar di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Rivqy mengungkap fakta omzet ritel modern nasional kini mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun. Di sisi lain, jutaan UMKM yang menopang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional justru masih kesulitan mengakses pasar dan permodalan.

Ketimpangan itu perlu diatasi lewat penetapan regulasi perizinan dan pemerataan kesempatan usaha. "Kesetaraan ekonomi harus menjadi prioritas," tandas politikus PKB ini.

Pemerintah Pusat (Pempus)

dan Pemerintah Daerah (Pemda)

perlu memastikan aturan izin

ritel modern tidak merugikan pedagang kecil di sekitar mereka.

Utamanya soal titik lokasinya.

"Sekarang bisa kita lihat di banyak daerah radius nggak sampai 200 meter ada ritel modern," kata legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Dia mendorong adanya kerja sama antara ritel modern dan UMKM lokal. Buka ruang bagi produk-produk lokal di jaringan



Rivqy Abdul Halim

minimarket. Selain itu, setiap kebijakan berbasis pada data dan keadilan ekonomi dan bukan tekanan pasar semata.

Modernisasi ekonomi penting, tapi harus didasari pada kompetitif yang adil. Tujuannya agar tidak ada yang tertinggal. Apalagi amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menekankan pada dasar prinsip ekonomi berkeadilan.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim meminta pernyataan Menko PM Muhammin Iskandar ditempatkan dalam konteks kritik membangun, bukan serangan terhadap industri ritel modern.

Pernyataan itu juga sebagai alarm keras agar semua pihak, terutama perusahaan besar, lebih serius merangkul UMKM di sekitarnya.

"Agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha besar dan UMKM, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh lebih adil dan berkelanjutan," ujar Nunik-sapaan akrabnya, Jumat (31/10/2025).

Kritik seperti ini, tambah Nunik, perlu dibaca dengan semangat meritokrasi ekonomi. Artinya, siapa pun yang berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi nyata harus mendapat ruang tumbuh yang setara.

Nunik menegaskan, UMKM selama ini turut menjadi humbug ekonomi rakyat dan penyanga ketahanan nasional, terutama saat krisis. Tapi, tidak bisa dipungkiri dalam praktiknya banyak pelaku UMKM yang terpinggirkan akibat kuatnya dominasi jaringan ritel besar dan keterbatasan akses pasar.

Sebagai langkah konstruktif, Nunik mendorong Pemerintah dan dunia usaha memperkuat model kemitraan berbasis ekosistem antara ritel modern dan UMKM lokal.

Selain itu, ritel modern harus

lebih serius memberi porsi etalase khusus bagi produk UMKM, fasilitasi pelatihan manajemen usaha, hingga sistem distribusi terpadu yang memberi peluang setara bagi produsen kecil. Kunciannya adalah kolaborasi dan keberpihakan yang cerdas.

"Kita tidak anti-industri besar, tapi ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial," tanda mantan Wakil Gubernur Lampung ini.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Leontinus Alpha Edison mengatakan, pihaknya tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM dari gempuran perusahaan ritel modern besar.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

"Pemerintah tidak sedang mematikan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil," kata Leon dalam keterangan, Jumat (31/10/2025). ■